



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

# **LAPORAN MANAJEMEN RISIKO**

**TRIWULAN 4**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi pemerintah.



Salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Penilaian Risiko. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Diharapkan dengan tersusunnya Peta Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam mencapai tujuan/sasaran penetapan kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Manajemen Risiko ini. Selanjutnya, kami berharap agar laporan ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik

Simpang Empat, Februari 2023

Sekretaris Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

HENDRA PUTRA, S.STP.

NIP. 19760430 199511 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Ruang Lingkup .....	5
<b>BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PADA SEKRETARIAT DAERAH.....</b>	6
2.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2022 .....	9
2.2 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2022 .....	15
<b>BAB III HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	23
<b>BAB IV MONITORING KEJADIAN RISIKO DAN RTP .....</b>	25
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	31
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah menerbitkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Seiring dinamika pembangunan dan penyesuaian dengan kebijakan serta aturan yang terus disempurnakan, aturan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diperbarui dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta

kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan dan sasaran kerja tahunannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil. Sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko. Manajemen resiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian dan pengendalian risiko yang tidak dapat diterima melalui pengembangan strategi pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Oleh sebab itu melalui manajemen

resiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan, karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Dalam upaya memaksimalkan capaian tujuan SPIP inilah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3 di tahun 2022. Sebagai langkah awal, hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Menuju Level 3 antara Perwakilan BPKP Sumbar dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Beberapa poin yang diuraikan dalam Piagam Komitmen Bersama tersebut antara lain meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, mengimplementasikan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada seluruh perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan *Clean Governance* dan *Clean Government*, meningkatkan kualitas perencanaan pemerintah daerah, meningkatkan manajemen risiko indeks melalui pengelolaan risiko strategis dan risiko operasional pada pemerintah daerah dan perangkatnya, meningkatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi serta meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya manajemen risiko untuk mendorong efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran strategisnya. Didorong oleh kesadaran tersebut, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah, sedang, dan akan selalu mendorong penyelenggaraan SPIP terintegrasi sebagaimana tertuang dalam Piagam Komimen Bersama tersebut. Melalui manajemen risiko diharapkan dapat diketahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga

diharapkan kegiatan di Sekretariat Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penerapan Manajemen Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) guna tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penerapan manajemen risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan hukum yang berlaku;
- f. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

## 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan pelaksanaan penilaian risiko ini adalah pada tingkat operasional yakni penilaian risiko pada tingkat kegiatan operasional di Sekretariat Daerah dan pada tingkat strategis OPD yang merupakan penilaian risiko pada tingkat strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

## BAB II

### RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PADA SEKRETARIAT DAERAH

Sebelum penilaian risiko dimulai, beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu, yakni:

- *Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan yang akan digunakan.*

Pihak jajaran tingkat atas manajemen merumuskan skala dampak dan kemungkinan terlebih dahulu sebelum proses penilaian risiko dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi. Aspek yang dapat dijadikan pertimbangan kriteria kemungkinan dan dampak antara lain adalah reputasi organisasi, kerugian finansial, berhentinya pelayanan, kerugian pihak ketiga, kerusakan lingkungan, dan bahkan terhambatnya/kegagalan pencapaian tujuan organisasi.

Kerangka kemungkinan dan dampak dapat dilihat pada tabel berikut :

- 1) Tingkat Probabilitas (Kemungkinan) Keterjadian Risiko ditentukan melalui Kriteria kemungkinan keterjadian risiko adalah sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	4	Sangat sering/hampir pasti terjadi (probabilitas > 75%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	3	Sering terjadi (probabilitas > 50% s.d.75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi/meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 50%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun

## 2) Tingkat Potensi Dampak

Kriteria area dampak dan level dampak risiko adalah sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukuman
Sangat Tinggi	4	Kerugian >50 Juta	Kegiatan Terhenti, Tujuan Tidak Tercapai	Ada pemberitaan negative tingkat Nasional/ Internasional	Pelanggaran Pidana/ Disiplin Berat ASN
Tinggi	3	Kerugian >10 Juta s/d 50 Juta	Kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	Ada pemberitaan negative tingkat Kabupaten	Pelanggaran Disiplin Sedang ASN
Rendah	2	Kerugian >1 Juta s/d 10 Juta	Kegiatan Terhambat, kurang efisien	Ada pemberitaan negative tingkat local/Nagari/ Kecamatan	Pelanggaran Disiplin Ringan ASN, Sanksi, Teguran tertulis
Sangat Rendah	1	Kerugian s/d 1 Juta	Ada hambatan kegiatan, namun tertangani	Ada pemberitaan negative tapi tidak material	Pelanggaran Disiplin Ringan ASN, Sanksi, Teguran lisan

➤ *Menetapkan selera risiko (risk appetite).*

Selera risiko merupakan tingkat risiko yang dapat diterima oleh suatu organisasi apabila risiko tersebut benar-benar terjadi.

Kriteria penerimaan risiko yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel berikut:

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1 s/d < 3 (Sangat Rendah)	Dapat Diterima
3 s/d < 6 (Rendah)	Dapat Diterima
6 s/d < 12 (Tinggi)	Harus menjadi Perhatian Manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
>= 12 (Sangat Tinggi)	Tidak Dapat Diterima, harus dilakukan pengendalian yang sangat baik

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan *acceptable/unacceptable risk*, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* yang telah ditentukan.

Berdasarkan identifikasi risiko yang telah dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) oleh kelompok Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

masing-masing bagian di Sekretariat Daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian, terdapat empat puluh delapan (48) risiko teridentifikasi pada Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri atas lima (5) risiko strategis dan empat puluh tiga (43) risiko operasional. Risiko-risiko ini kemudian dianalisis guna menentukan risiko prioritas. Berdasarkan analisis risiko tersebut menunjukkan terdapat 21 risiko prioritas yang terdiri atas 19 (sembilan belas) risiko operasional dan 2 risiko strategis yang tingkat risikonya lebih besar dari selera risiko (*risk appetite*). Risiko tersebut adalah risiko yang ingin dikendalikan, rincian risiko tersebut adalah sebagai berikut:

a. Risiko Strategis, terdiri atas:

- 1) Risiko tujuan/sasaran, Ukuran kinerja dan terget serta program/kegiatan tidak jelas/tidak berorientasi hasil.
- 2) Risiko tingginya angka/nilai temuan pemeriksaan

b. Risiko Operasional terdiri atas:

- 1) Risiko Perhitungan kebutuhan dana terkait pengadaan BMD tidak tepat
- 2) Risiko Kebutuhan BMD belum terdata dengan baik
- 3) Risiko Kesalahan penganggaran rekening pengadaan BMD
- 4) Risiko Tamu pemda yang datang melebihi undangan
- 5) Risiko belum optimalnya penyampaian LPPD.
- 6) Resiko tertundanya/pembatalan kelanjutan proses tender/seleksi paket kegiatan OPD.
- 7) Risiko Pembatalan hasil tender/ seleksi
- 8) Resiko Proses kegiatan PBJ tidak dilaksanakan tertib , disiplin serta sistematis

- 9) Resiko Belum lengkapnya data dan informasi terkait sektor ekonomi mikro kecil
- 10) Risiko Produk unggulan daerah belum terdata secara maksimal
- 11) Risiko Rendahnya kinerja perusahaan daerah
- 12) Risiko Belum optimalnya perancangan produk hukum pemerintah daerah
- 13) Risiko Belum optimalnya penanganan perkara pemerintah daerah
- 14) Risiko Belum terlaksananya update data produk hukum pada website
- 15) Risiko Banyaknya BMD tidak ditemukan
- 16) Risiko Terlambatnya penyampaian laporan BMD
- 17) Risiko Belum tersusunnya standar pelayanan
- 18) Risiko Belum lengkapnya SOP pelayanan
- 19) Risiko Data kegiatan/acara KDH/WKDH yang belum bisa dijadwalkan

## 2.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2022

Diantara risiko prioritas sebagaimana diuraikan di atas, telah disusun rencana waktu pelaksanaan terkait kegiatan pengelolaan yang diperlukan untuk setiap risiko. Melalui kegiatan pengendalian risiko dimaksud diharapkan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan risiko yang ada. Rencana kegiatan pengelolaan risiko di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Triwulan IV Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Rencana Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

Pimpinan instansi pemerintah harus memastikan terjalinnya komunikasi internal dan eksternal yang efektif terutama yang memberikan dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan kegiatan lainnya termasuk penganggaran dan pendanaannya. Agar terjadi komunikasi yang efektif instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Rencana pengkomunikasian kegiatan pengendalian untuk setiap risiko tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**RENCANA PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1	Evaluasi atas implementasi SOP perencanaan dan penganggaran, SOP pelaporan kinerja	Rapat	Bagian Perkeu	BKPSDM, SETDA	Triwulan I dan IV 2022
2	Evaluasi atas implementasi SOP terkait pengelolaan BMD dan Belanja Daerah	Rapat/Surat edaran	Bagian Perkeu dan Umum	ASN SETDA terkait	Triwulan I dan IV 2022
3	Inventarisasi kebutuhan BMD lebih detail	Rapat	Bagian Umum	Bagian Perlengkapan, ASN lain yang terkait	Triwulan III dan IV 2022
4	Menyusun SOP pengadaan BMD	Rapat	Bagian Umum	Bagian Perlengkapan, ASN lain yang terkait	Triwulan I 2022
5	Review atas indikator dan ukuran kinerja serta ketepatan pembebanan rekening belanja	Rapat	Bagian Perkeu dan Umum	ASN SETDA terkait	Triwulan III dan IV 2022
6	Memastikan jumlah tamu/undangan kegiatan KDH/WKDH yang hadir	Undangan/daftar tamu	Sekda/Kabag Umum	Tamu yang akan hadir	Jan s.d Des 2022
7	Audiensi OPD dengan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur terkait LPPD	Tatap muka, WA Grup, surat peringatan	Sekda/Kabag Pemerintahan	OPD	Triwulan I 2022
8	Sosialisasi regulasi baru PBJ	Rapat(tatap muka/zoom/live streaming)	Sekda/Kabag PBJ	ASN OPD terkait	Triwulan I,II 2022
9	Monitoring dan evaluasi proses pengadaan	Rapat	Sekda/Kabag PBJ/Kabag AP	POKJA	Triwulan I, II 2022
10	Bimtek SDM serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PBJ	Rapat/Surat edaran	Sekda/Kabag PBJ/Kabag AP	ASN OPD terkait	Triwulan III 2022

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
11	Koordinasi berkala dengan OPD dan pihak terkait berkenaan dengan sektor ekonomi mikro kecil	Surat, instruksi, buku pedoman, rapat	Sekda/Kabag Perekonomian & SDA	OPD, Perusda dan Instansi terkait	Semestar I dan II 2022
12	Monitoring dan evaluasi proses pengadaan	Surat, undangan, koordinasi dan konsultasi, rapat	Sekda/Kabag Perekonomian & SDA	OPD dan pelaku usaha	Semestar I dan II 2022
13	Pembinaan, dan pengawasan perusahaan daerah oleh pemda	Surat, undangan, koordinasi dan konsultasi, rapat	Sekda/Kabag Perekonomian & SDA	OPD dan pihak terkait	Trw. I, II, III dan IV 2022
14	- Peningkatan kompetensi personil terkait perancangan produk hukum daerah - Pendidikan dan pelatihan personil terkait	Pertemuan/rapat	Sekda/Kabag Hukum	ASN terkait pada Bag. Hukum	Jun-22
15	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan terkait penanganan perkara pemerintah daerah pada DPA Perubahan	Surat permohonan/usulan RKA Perubahan	Sekda/Kabag Hukum	TAPD	Jun-22
16	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan terkait <i>update</i> data produk hukum pada <i>website</i> pemerintah daerah pada DPA	Surat permohonan/usulan RKA Perubahan	Sekda/Kabag Hukum	TAPD	Jun-22
17	- Peningkatan kompetensi personil - Pendidikan dan pelatihan personil	Instruksi/SK	Sekda/Kabag Umum	Staf SETDA terkait	Jun-22
18	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan pada DPA Perubahan	Rapat/Surat edaran	Sekda/Kabag Perkeu	Staf SETDA terkait	Triwulan I 2022
19	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan pada DPA Perubahan	Program Pelatihan Mandiri (PPM)	Sekda/Kabag Orgs	Semua OPD	Jun-22
20	Menetapkan menunjuk petugas/pengurus barang di lokasi rawan kehilangan aset	Program Pelatihan Mandiri (PPM)	Sekda/Kabag Orgs	Semua OPD	Jun-22
21	Evaluasi atas implementasi SOP penyusunan laporan BMD	WA Grup	ADC, Sespri	Petugas Protokol	Jan s.d Des 2022

b. Rencana Pemantauan Kegiatan Pengendalian

Rencana pemantauan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk 21 risiko prioritas sampai dengan triwulan IV

Tahun 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**RENCANA PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d	e
1	Evaluasi atas implementasi SOP perencanaan dan penganggaran, SOP pelaporan kinerja	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Perkeu	Trw I 2022 & Triwulan I 2023
2	Evaluasi atas implementasi SOP terkait pengelolaan BMD dan Belanja Daerah	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Perkeu dan Umum	Trw I 2022 & Triwulan I 2023
3	Inventarisasi kebutuhan BMD lebih detail	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Umum	Triwulan IV 2022 dan Triwulan I 2023
4	Menyusun SOP pengadaan BMD	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Umum	Triwulan II 2022
5	Review atas indikator dan ukuran kinerja serta ketepatan pembebanan rekening belanja	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Umum	Triwulan IV 2022 dan Triwulan I 2023
6	Memastikan jumlah tamu/undangan kegiatan KDH/WKDH yang hadir	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Umum	Jan s.d Des 2022

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d	e
7	Audiensi OPD dengan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur terkait LPPD	Konfirmasi pelaksanaan, jemput bola terkait kekurangan data OPD	Sekda/Kabag Pemerintahan	Triwulan I 2022
8	Sosialisasi regulasi baru PBJ	Sosialisasi	Sekda/Kabag PBJ	Trw II & III 2022
9	Monitoring dan evaluasi proses pengadaan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag PBJ/Kabag AP	Trw II & III 2022
10	Bimtek SDM serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PBJ	Bimtek	Sekda/Kabag PBJ/Kabag AP	Triwulan IV 2022
11	Koordinasi berkala dengan OPD dan pihak terkait	Fasilitasi pertemuan dg OPD dan pihak terkait	Sekda/Kabag Perekonomian dan SDA	Trw I, II, III, IV 2022
12	Inventarisasi produk unggulan/potensi daerah	Fasilitasi pertemuan dengan pelaku usaha dan OPD terkait	Sekda/Kabag Perekonomian dan SDA	Semester I dan II 2022
13	Pembinaan, dan pengawasan oleh pemda	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Perekonomian dan SDA	Semester I dan II 2022
14	-Peningkatan kompetensi personil terkait perancangan produk hukum daerah - Pendidikan dan pelatihan personil terkait perancangan produk hukum daerah	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Hukum	Jun-22
15	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan pada DPA Perubahan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Hukum	Jun-22

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d	e
16	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan pada DPA Perubahan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Hukum	Jun-22
17	Menetapkan menunjuk petugas/pengurus barang di lokasi rawan kehilangan aset	Forum Rapat Pimpinan/Rapat/SK penunjukan	Sekda/Kabag Umum	Jul-22
18	Evaluasi atas implementasi SOP penyusunan laporan BMD	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Perkeu	Trw II & III 2022
19	Fasilitasi/pendampingan penyusunan standar pelayanan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Orgs	Jun dan Juli 2022
20	Fasilitasi/pendampingan penyusunan SOP	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Orgs	Jun dan Juli 2022
21	Mengagendakan seluruh kegiatan KDH/WKDH dan membagikannya kepada seluruh petugas terkait	Papan informasi keg, konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Protokol	Jan s.d Des 2022

## 2.2 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2022

### a. Realisasi Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian

Dari rencana pengkomunikasian yang telah disusun atas risiko-risiko prioritas yang telah diidentifikasi sampai dengan triwulan IV, dapat digambarkan realisasinya pada tabel berikut:

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**REALISASI PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Evaluasi atas implementasi SOP perencanaan dan penganggaran, SOP pelaporan kinerja	Rapat	Bagian Perkeu	BKPSDM, SETDA	Triwulan I dan IV 2022	Mar-22	rapat internal
2	Evaluasi atas implementasi SOP terkait pengelolaan BMD dan Belanja Daerah	Rapat/Surat edaran	Bagian Perkeu dan Umum	ASN SETDA terkait	Triwulan I dan IV 2022	Mar-22	rapat internal
3	Inventarisasi kebutuhan BMD lebih detail	Rapat	Bagian Umum	Bagian Perlengkapan,	Triwulan III dan IV 2022	Agu-22	rapat internal
4	Menyusun SOP pengadaan BMD	Rapat	Bagian Umum	Bagian Perlengkapan,	Triwulan I 2022	Mar-22	rapat staf
5	Review atas indikator dan ukuran kinerja serta ketepatan pembebanan rekening belanja	Rapat	Bagian Perkeu dan Umum	ASN terkait	Triwulan III dan IV 2022	Agu-22	surat tugas review oleh APIP
6	Memastikan jumlah tamu/undangan kegiatan KDH/WKDH yang hadir	Undangan/daftar tamu	Sekda/Kabag Umum	Tamu yang akan hadir	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Sept	Selalu ada kelebihan jml tamu yg hadir yang tidak terdaftar dalam undangan
7	Audiensi OPD dengan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur terkait LPPD	Tatap muka, WA Grup, surat peringatan	Sekda/Kabag Pemerintahan	OPD	Triwulan I 2022	Mar-22	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasi an	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
8	Sosialisasi regulasi baru PBJ	Rapat(tatap muka/zoom/live streaming)	Sekda/Kabag PBJ	ASN OPD terkait	Triwulan I,II 2022	Jun-22	
9	Monitoring dan evaluasi proses pengadaan	Rapat	Sekda/Kabag PBJ/Kabag	POKJA	Triwulan I, II 2022	Jun-22	
10	Bimtek SDM serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PBJ	Bimtek	Sekda/Kabag PBJ/Kabag AP	Staf SETDA terkait	Triwulan III 2022	April, Jun, Sept, Des	surat undangan monev, bimtek tdk terlaksana
11	Koordinasi berkala dengan OPD dan pihak terkait berkenaan dengan sektor ekonomi mikro kecil	Surat, instruksi, buku pedoman, rapat	Sekda/Kabag Perekonoma n & SDA	OPD, Perusda dan Instansi terkait	Semestar I dan II 2022	Juli dan Agus	rapat/pertemuan
12	Inventarisasi produk unggulan/potensi daerah	Surat, undangan, koordinasi dan konsultasi, rapat	Sekda/Kabag Perekonoma n & SDA	OPD dan pelaku usaha	Semestar I dan II 2022	Feb-22	rapat
13	Pembinaan, dan pengawasan perusahaan daerah oleh pemda	Surat, undangan, koordinasi dan	Sekda/Kabag Perekonoma n & SDA	OPD dan pihak terkait	Trw. I, II, III dan IV 2022	Maret, April, Juni, Juli	rakor/pertemuan
14	- Peningkatan kompetensi personil terkait perancangan produk hukum daerah - Pendidikan dan pelatihan personil terkait perancangan produk hukum daerah	Pertemuan/rapat	Sekda/Kabag Hukum	ASN terkait pada Bag. Hukum	Jun-22	Jul-22	rapat internal

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasi an	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
							a b c d e f g h
15	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan terkait penanganan perkara pemerintah daerah pada DPA Perubahan	Surat permohonan/usulan RKA Perubahan	Sekda/Kabag Hukum	TAPD	Jun-22	Jun-22	Usulan penambahan anggaran sdh diajukan
16	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan terkait update data produk hukum pada website pada DPA Perubahan	Surat permohonan/usulan RKA Perubahan	Sekda/Kabag Hukum	TAPD	Jun-22	Jun-22	Usulan penambahan anggaran sdh diajukan
17	Menetapkan menunjuk petugas/pengurus barang di lokasi rawan kehilangan aset	Instruksi/SK	Sekda/Kabag Umum	Staf SETDA terkait	Jun-22	tidak terlaksana	Keterbatasan personil
18	Evaluasi atas implementasi SOP penyusunan laporan BMD	Rapat/Surat edaran	Sekda/Kabag Perkeu	Staf SETDA terkait	Triwulan I 2022	Feb-22	SOP sdh memadai hanya saja pelaksanaan SOP yang belum optimal, seringkali terkendala saat permintaan dokumen pengadaan BM ke PPTK
19	Fasilitasi/pendampingan penyusunan standar pelayanan	Program Pelatihan	Sekda/Kabag Orgs	Semua OPD	Jun-22	Apr-22	surat
20	Fasilitasi/pendampingan penyusunan SOP	Program Pelatihan	Sekda/Kabag Orgs	Semua OPD	Jun-22	Apr-22	surat
21	Mengagendakan seluruh kegiatan KDH/WKDH dan membagikannya kepada seluruh petugas terkait	WA Grup	ADC, Sespri	Petugas Protokol	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Sept-22	

b. Realisasi Pemantauan Kegiatan Pengendalian

Dari rencana pemantauan yang telah disusun atas risiko-risiko prioritas yang telah diidentifikasi untuk triwulan III, dapat digambarkan realisasi kegiatannya pada tabel berikut:

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Evaluasi atas implementasi SOP perencanaan dan penganggaran, SOP pelaporan kinerja	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Perkeu	Trw I 2022 & Triwulan I 2023	Mar-22	konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan
2	Evaluasi atas implementasi SOP terkait pengelolaan BMD dan Belanja Daerah	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Perkeu dan Umum	Trw I 2022 & Triwulan I 2023	Mar-22	konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan
3	Inventarisasi kebutuhan BMD lebih detail	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Umum	Triwulan IV 2022 dan Triwulan I 2023	Sep-22	untuk APBD Perubahan 2022
4	Menyusun SOP pengadaan BMD	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Umum	Triwulan II 2022	Jan-22	SOP belum diimplementasikan dengan baik
5	Review atas indikator dan ukuran kinerja serta ketepatan pembebanan rekening belanja	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Perkeu dan Umum	Triwulan IV 2022 dan Triwulan I 2023	Okt-22	Laporan Hasil Review RKA oleh APIP

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
6	Memastikan jumlah tamu/undangan kegiatan KDH/WKDH yang hadir	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Umum	Jan s.d Des 2022	jan s.d sept	selalu ada kelebihan jml tamu yg hadir yang tidak terdaftar dalam undangan
7	Audiensi OPD dengan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur terkait	Konfirmasi pelaksanaan, jemput bola terkait kekurangan data OPD	Sekda/Kabag Pemerintahan	Triwulan I 2022	Mar-22	sebelum penyusunan LKPJ-LPPD
8	Sosialisasi regulasi baru PBJ	Sosialisasi	Sekda/Kabag PBJ	Trw II & III 2022	-	Sosialisasi blm bs dilaksanakan terkait adanya keterbatasan anggaran, namun Bagian PBJ Maret 2022 telah mengeluarkan SE ttg proses pemilihan pengadaan brg/jasa
9	Monitoring dan evaluasi proses pengadaan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag PBJ/Kabag AP	Trw II & III 2022	Sept dan Des	Rapat monev
10	Bimtek SDM serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PBJ	Bimtek	Sekda/Kabag PBJ/Kabag AP	Triwulan IV 2022	Sept dan Des	Movev dilaksanakan, Bimtek tdk terlaksana terkendala dukungan anggaran tdk memadai
11	Koordinasi berkala dengan OPD dan pihak terkait	Fasilitasi pertemuan dg OPD dan pihak terkait	Sekda/Kabag Perekonomian	Trw I, II, III, IV 2022	Juli, Agus	rapat/pertemuan. Koordinasi
12	Inventarisasi produk unggulan/potensi daerah	Fasilitasi pertemuan dengan pelaku usaha dan	Sekda/Kabag Perekonomian	Semester I dan II 2022	Feb-22	Pertemuan/rapat

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
13	Pembinaan, dan pengawasan perusahaan daerah oleh pemda	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan	Sekda/Kabag Perekonomian	Semester I dan II 2022	Maret, April & Juni, Juli, n	Rakor/pertemua
14	- Peningkatan kompetensi personil terkait perancangan produk hukum daerah - Pendidikan dan pelatihan personil terkait perancangan produk hukum daerah	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Hukum	Jun-22	Jul-22	
15	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan terkait penanganan perkara pemerintah daerah pada DPA Perubahan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Hukum	Jun-22	Jun-22	Usulan penambahan anggaran sdh diajukan
16	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan terkait update data produk hukum pada website pada DPA Perubahan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Hukum	Jun-22	Jun-22	Usulan penambahan anggaran sdh diajukan
17	Menetapkan menunjuk petugas/pengurus barang di lokasi	Forum Rapat Pimpinan/Rapat/SK	Sekda/Kabag Umum	Jul-22	-	tdk terlaksana
18	Evaluasi atas implementasi SOP penyusunan laporan BMD	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan	Sekda/Kabag Perkeu	Trw II & III 2022	Mar-22	
19	Fasilitasi/pendampingan penyusunan standar pelayanan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan	Sekda/Kabag Orgs	Jun dan Juli 2022	Apr-22	
20	Fasilitasi/pendampingan penyusunan SOP	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan	Sekda/Kabag Orgs	Jun dan Juli 2022	Apr-22	
21	Mengagendakan seluruh kegiatan KDH/WKDH dan membagikannya kepada seluruh petugas terkait	Papan informasi keg, konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kabag Protokol	Jan s.d Des 2022	Jan-Juni 22	



## BAB III

### HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan rencana dan realisasi kegiatan pengendalian risiko sebagaimana diuraikan dalam BAB II terhadap 21 rancangan pengendalian (mitigasi risiko) yang telah dibuat untuk triwulan III Tahun 2022, terdapat beberapa rancangan mitigasi/pengendalian yang belum bisa dilaksanakan sampai dengan akhir triwulan III, antara lain:

- a. Sosialisasi regulasi baru terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Peningkatan kompetensi personil dan diklat personil terkait perancangan produk hukum pemerintah
- c. Menetapkan/menunjuk petugas/pengurus barang di lokasi rawan kehilangan aset

Hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan sehingga beberapa kegiatan belum bisa direalisasikan:

- a. Sosialisasi regulasi baru terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa  
Kegiatan Sosialisasi terkait regulasi baru Pengadaan Barang dan Jasa ini terletak pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Selain kurangnya Sumber daya manusia, dukungan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan belum memadai, sehingga sosialisasi blm bisa dilaksanakan.
- b. Peningkatan kompetensi SDM terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah  
Proses pengadaan barang dan jasa merupakan unsur penting guna percepatan pembangunan di suatu daerah, karena dengan pengadaan barang dan jasa yang dilandaskan tata nilai pengadaan akan menciptakan penggunaan anggaran pembangunan yang tepat-guna dan berhasil-guna untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah serta peningkatan

pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang kurang memadai dapat ditingkatkan salah satunya melalui Blmtek maupun diklat peningkatan kapasitas SDM barang dan jasa. Namun untuk Tahun 2022 belum dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran.

- c. Menetapkan/menunjuk petugas/pengurus barang di lokasi rawan kehilangan aset

Risiko kehilangan Barang Milik Daerah/Asset menjadi salah satu risiko prioritas yang perlu dikendalikan di Tahun 2022. Banyaknya BMD yang tidak ditemukan dan masih dalam penelusuran pada beberapa tahun lalu membuat organisasi perlu melakukan mitigasi risiko lebih hati-hati, meskipun di Tahun 2021 kehilangan aset tidak terjadi. Namun demikian sampai dengan Desember 2022 belum ada penetapan/penunjukan petugas khusus untuk diserahi tanggung jawab atas BMD yang rawan kehilangan. Kurangnya Sumber Daya Manusia(SDM) menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Namun untuk pengamanan aset saat ini telah diupayakan dengan membuat pakta integritas bagi setiap orang yang menggunakan dan bertanggung jawab atas Barang Bergerak dibawah penguasaannya.

## BAB IV

### MONITORING KEJADIAN RISIKO/RISK EVENT DAN RTP

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Setiap unit kerja pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, Sekretaris Daerah selaku pimpinan tertinggi pada Sekretariat Daerah, menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang akan dikendalikan, maka Sekretariat Daerah membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) atas risiko-risiko prioritas Tahun 2022, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko. Pencatatan realisasi kejadian risiko dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko pada Sekretariat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian pada formulir Sampai dengan triwulan IV monitoring *risk event* dan RTP dapat dihat pada tabel berikut:

SEKRETARIAT DAERAH PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP										
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis Sekretariat Daerah</b>									
1	-Tujuan/sasaran tidak jelas/tdk berorientasi hasil -Ukuran kinerja dan target tidak jelas/tdk berorientasi hasil -Program/kegiatan tidak terkait dengan pencapaian sasaran/hasil	RSO.22.33.02.01	-	-	-	tdk terjadi	Evaluasi atas implementasi SOP perencanaan dan penganggaran, SOP pelaporan kinerja	Triwulan I dan IV 2022	Jun-22	Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan
2	Tingginya angka/nilai temuan hasil pemeriksaan	RSO.22.33.02.03	-	-	-	tdk terjadi	Evaluasi atas implementasi SOP terkait pengelolaan BMD dan Belanja Daerah	Triwulan I dan IV 2022	Jun-22	Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan
	Masalah/Risiko Baru: .....									
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional Sekretariat Daerah</b>									
1	Perhitungan kebutuhan dana terkait pengadaan BMD tidak tepat	ROO.22.33.02.01	-	-	-	tdk terjadi	Inventarisasi kebutuhan BMD lebih detail	Triwulan III dan IV 2022	Sep-22	APBD P 2022
2	Kebutuhan BMD belum terdata dengan baik	ROO.22.33.02.02	27-Mei-22	Terjadi ketidaksinkronan barang yang dibutuhkan dg barang yang dianggarkan di DPA.	Pengadaan BMD menjadi tidak efektif dan efisien	Belanja Lemari pada Bagian Umum	Menyusun SOP pengadaan BMD	Triwulan I 2022	Jan-22	SOP belum berjalan optimal
3	Kesalahan penganggaran rekening pengadaan BMD	ROO.22.33.02.03	Juni, Oktober s.d Desember	BM di apkilasi sdh diklasifikasikan oleh admin, OPD tinggal memilih yg sdh tersedia	Rincian Aset di Lap BMD tdk sama dengan Neraca Keuangan	BM Pecah Belah, Kursi Plastik dan Alat Dapur	Review atas indikator dan ukuran kinerja serta ketepatan pembebanan rekening belanja	Triwulan III dan IV 2022	Oktober	Laporan Hasil Review RKA oleh APIP
4	Tamu yang datang melebihi undangan	ROO.22.33.02.09	Jan-Des	selalu ada kelebihan jml tamu yg hadir yang tidak terdaftar dalam undangan	Pelayanan tamu tidak maksimal		Memastikan jumlah tamu/undangan kegiatan KDH/WKDH yang hadir	Jan s.d Des 2022	Jan - Desember	Ada kejadian tak terduga/tamu yg tdk bs diprediksi

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
5	Belum optimalnya penyampaian LPPD	ROO.22.33.02.12	Feb-22	- Ketidaklengkapan data OPD, yang menyebabkan keterlambatan penyusunan LPPD - Adanya mutasi personil/pegawai	Tidak optimalnya esensi LPPD yang disampaikan		Audiensi OPD dengan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur terkait LPPD	Triwulan I 2022	Mar-22	sebelum LKPJ dan LPPD disusun
6	Tertundanya / pembatalan kelanjutan proses tender/ seleksi paket kegiatan OPD tertentu	ROO.22.33.02.17	-	-	-	hanya ada pengulangan tender/ seleksi sesuai persetujuan PPK	Sosialisasi regulasi baru PBJ	Triwulan II,III 2022	-	tdk terlaksana
7	Pembatalan hasil tender/ seleksi	ROO.22.33.02.18	-	-	-	tidak terjadi	Monitoring dan evaluasi proses pengadaan	Triwulan II,III 2022	Juni, Dseember	Rapat internal
8	Proses kegiatan PBJ tidak dilaksanakan tertib , disiplin serta sistematis	ROO.22.33.02.19	-	-	-	tidak terjadi	Bimtek SDM serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PBJ	Triwulan IV 2022	Sept dan Desember	Monev terlaksana, Bimtek tidak terlaksana
9	Belum lengkapnya data dan informasi terkait sektor ekonomi mikro kecil	ROO.22.33.02.24	Trw II 2022	Data yang diperoleh dari OPD terkait blm lengkap/belum semua OPD menyampaikan data UMKM 2022	keterlambatan penyusunan data ekonomi mikro kecil Pasaman Barat		Koordinasi berkala dengan OPD dan pihak terkait berkenaan dengan sektor ekonomi mikro kecil	Jan s.d Des 2022	Mar, Juli, Agus	- Rakor KP3 Koordinasi KP3 ke Provinsi - Rapat TPAKD pelaksanaan simpanan pelajar - Kegiatan pengendalian inflasi pangan pada TPID
10	Produk unggulan daerah belum terdata secara maksimal	ROO.22.33.02.25	-	-	-	tidak terjadi	Inventarisasi produk unggulan/potensi daerah	Jan s.d Des 2022	-	telah dilakukan inventarisasi produk unggulan/potensi daerah di akhir 2021 dan dilanjutkan di Tahun 2022, namun update data produk unggulan daerah blm dirilis sampai dengan 31 Des 2022

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
11	Rendahnya kinerja perusahaan daerah	ROO.22.33.02.26		-	-	s.d Juni 22 kinerja perusahaan telah mengalami peningkatan dibandingkan th 2021	Pembinaan, dan pengawasan perusahaan daerah oleh pemda	Jan s.d Des 2022	April, Mei, Juli, Agus	- Fasilitasi seleksi diri PDAM - Penetapan Perbup Pengadaan Brg dan Jasa pada Perumda - Rapat Pelaksanaan pemasangan MBR - Koordinasi tarif atas tarif bawah PDAM
12	Belum optimalnya perancangan produk hukum pemerintah daerah	ROO.22.33.02.27					- Peningkatan kompetensi personil terkait perancangan produk hukum daerah - Pendidikan dan pelatihan personil terkait perancangan produk hukum daerah	Jun-22	Okt- Nov	Bimtek terkait perancangan produk hukum daerah yang diselenggarakan oleh Kemenkumham
13	Belum optimalnya penanganan perkara pemerintah daerah	ROO.22.33.02.28	Mar September	Mutasi personil, shg pegawai terkait penanganan perkara kosong	Perkara pemerintah daerah blm tertangani/terfasilitasi dengan baik		Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan terkait penanganan perkara pemerintah daerah pada DPA Perubahan	Jun-22	Sep-22	Telah diakomodir pada APBD Perubahan 2022
14	Belum terlaksananya update data produk hukum pada website	ROO.22.33.02.29	Feb-Mei	jaringan error/terganggu/kena hack	Produk hukum tidak bisa dipublish dan disosialisasikan dengan baik	Selama Trw III telah dilakukan update pada website JDIH, dan saat ini belum diverifikasi oleh BPHN untuk proses publikasi di website.	Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan terkait update data produk hukum pada website pada DPA Perubahan	Jun-22	Jun-22	Usulan penambahan anggaran sdh disetujui, namun ada kegiatan yang mesti diprioritaskan terlebih dahulu sehingga alokasi untuk keg. Update produk hukum daerah tertunda. Namun update produk hukum dimaksud sdh difasilitasi oleh Dinas Kominfo dan telah diupdate di bulan Desember 2022

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
15	Banyaknya BMD tidak ditemukan	ROO.22.33.02.33	-	-	-	blm dilakukan spot check/inventarisasi untuk mengecek apakah di Tahun 2022 ada BMD hilang/tidak ditemukan	Forum Rapat Pimpinan (FRP), Penunjukan petugas/pengurus brg yg bertanggungjawab khusus atas BMD pada lokasi rawan kehilangan BMD	Trw III 2022	-	blm terlaksana
16	Terlambatnya penyampaian laporan BMD	ROO.22.33.02.36	Jun-22	Dokumen pengadaan dan mutasi lama diterima dari PPTK dan Pengurus Barang	Entri Data Pengadaan BMD terlambat, rekonsiliasi terlambat		FRP agar adanya produk hukum utk pembatasan pengajuan permintaan pembayaran utk pengadaan brg/jasa yg telah selesai, untuk meminimalisir lamanya pengajuan permintaan pembayaran dari rekanan	Trw III 2022		pada FGD bersama BPKD dan OPD telah disampaikan usulannya ke BPKD agar dibuatkan aturan terkait pencairan berkenaan dg BAST mundur, dan akan ditindaklanjuti, namun per 31 Des blm ada aturan yg diterbitkan terkait hal tsb
							Evaluasi atas implementasi SOP penyusunan laporan BMD	Trw II & III 2022	Mar-22	rapat internal
17	Belum tersusunnya standar pelayanan	ROO.22.33.02.39	-	-	-	Std. Pelayanan sdh ada, Hy beberapa perlu diperbarui	Fasilitasi/pendampingan penyusunan standar pelayanan	Jun dan Juli 2022	Mulai Apr 222	sepanjang ada update SOP pendampingan/fasilitasi bisa dilakukan ke Bag. Organisasi
18	Belum lengkapnya SOP pelayanan	ROO.22.33.02.40	-	-	-	SOP sdh ada, ny beberapa perlu diperbarui	Fasilitasi/pendampingan penyusunan SOP	Jun dan Juli 2022	Mulai April 2022	sepanjang ada update SOP pendampingan/fasilitasi bisa dilakukan ke Bag. Organisasi

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
19	Data kegiatan/acara KDH/WKDH yang belum bisa dijadwalkan	ROO.22.33.02.41	Feb-Maret	Bencana alam, dan permintaan khusus pertemuan dg Bupati terkait Penanganan Bencana	Tidak seluruh pertemuan bisa dihadiri KDH/WKDH, dan adanya kekurangpuasan krn tidak bs bertemu KDH/WKDH secara langsung		Mengagendakan seluruh kegiatan KDH/WKDH dan membagikannya kepada seluruh petugas terkait	Jan s.d Des 2022	Jan - September	Agenda kerja KDH/WKDH disusun rutin setiap bulan
	Masalah/Risiko Baru: .....									

## BAB V

### PENUTUP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Daerah merupakan wujud komitmen dalam rangka meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas. Penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, disamping itu dalam implementasinya menekankan pada pentingnya pengendalian berdasarkan faktor *soft control* yaitu mengutamakan faktor komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pejabat serta pegawai.

Dalam rangka meningkatkan maturitas level penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Sekretariat Daerah secara berkelanjutan telah berupaya melakukan perbaikan atas proses pengendalian intern dan proses bisnis kegiatan unit kerja melalui pemantauan atas pengendalian intern yang telah dilakukan secara mandiri dalam rangka menguji dan menilai efektivitas pengendalian intern. Agar peningkatan maturitas level penyelenggaraan SPIP terintegrasi dapat berhasil dengan baik, diperlukan perbaikan-perbaikan yang terus menerus dan komunikasi yang berkesinambungan oleh Sekretaris Daerah selaku pimpinan tertinggi organiasasi, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Manajemen risiko sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP terintegrasi berupaya memaksimalkan capaian tujuan SPIP dalam rangka peningkatan level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3 di tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dalam Piagam Komitmen Bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan BPKP Perwakilan Sumbar. Melalui manajemen risiko diharapkan dapat diketahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi,

sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Sekretariat Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih optimal.

Simpang Empat, Februari 2023

Sekretaris Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

HENDRA PUTRA,S.STP.  
NIP. 19760430 199511 1 001